

# RELASI ULAMA DAN PENGUASA MASA KOLONIALISME

Agung Perdana Kusuma  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
aperdanaku@gmail.com

## Abstract

In the 18th century, although the Dutch Company controlled most of the archipelago, the Netherlands also experienced a decline in trade. This was due to the large number of corrupt employees and the fall in the price of spices which eventually created the VOC. Under the rule of H.W. Daendels, the colonial government began to change the way of exploitation from the old conservative way which focused on trade through the VOC to exploitation managed by the government and the private sector. Ulama also strengthen their ties with the general public through judicial management, and compensation, and waqaf assets, and by leading congregational prayers and various ceremonies for celebrating birth, marriage and death. Their links with a large number of artisans, workers (workers), and the merchant elite were very influential.

**Kata Kunci :** Relasi, Ulama, Penguasa, Kolonialisme

## A. Pendahuluan

Ulama merupakan tokoh atau orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama dengan baik. Ulama sebagai figur dan tauladan bagi orang-orang disekitarnya, dan secara umum ulama adalah tempat bertanya serta mengetahui berbagai ilmu sesuai dengan bidang ulama tersebut. Islam merupakan agama yang sempurna, dan ulama mempunyai peranan penting dalam transmisi ajaran Islam, hingga Nabi Muhammad SAW berkata mereka adalah pewaris Nabi.<sup>1</sup>

Kedudukan dan kemuliaan para ulama' telah diabadikan didalam Al-Qur'an, surat Al-Faathir ayat 28 yang berbunyi: "Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maksud dari ayat di atas adalah bahwa ulama' merupakan orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan syari'atnya. Luas tidaknya pengetahuan seorang ulama' akan menentukan kadar ketakutannya kepada Allah. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah termasuk menjadi pemimpin atau penguasa.

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa Arab "alim" yang secara harfiah berarti orang yang berilmu, lawan kata ilm (Ilmu) adalah jahil (bodoh). Latar belakang pengertian ini selalu dihubungkan dengan istilah ilmu pengetahuan agama, baik dalam pengertian genosis maupun pengertian eksotis hukum agama. Pada masa-masa paling awal Islam yang disebut ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan

---

<sup>1</sup> "Siapa yang menempuh jalan dalam mencari ilmu maka Allah memberinya salah satu jalan menuju Surga, dan sesungguhnya Malaikat menundukkan sayapnya karena rida terhadap orang yang mencari ilmu, dan sesungguhnya orang alim akan dipintakan ampunan oleh apa yang ada di bumi dan langit hingga ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya orang yang berilmu dan seorang hamba bagaikan keutamaan bulan atas semua bintang-bintang dan sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan Dinar atau Dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, dan siapa orang yang mengambilnya maka ia telah beruntung". (HR Abu Daud) Lihat Abu Daud al-Sijistani, Sunan Abu Daud, 1 ed. (Beirut: Dar El-Risalah al-Alamiyyah, 2009), 485.

tentang ilmu – ilmu agama. Pada masa al-Khulafaur-Rasyidin tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan kealaman, dan pemisahan politik praktis. Para sahabat Nabi saw umumnya memiliki pengetahuan keagamaan dan sekaligus mereka juga pelaku-pelaku politik praktis. Para sahabat terkemuka pada masa itu biasanya duduk dalam satu dewan pertimbangan yang disebut Ahl al-Halli wa al-Aqd. Oleh ulama, para sahabat ini kemudian disebut ulama salaf.

Baru pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan sesudahnya, istilah ulama lebih ditekankan kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan saja. Bahkan karena ada pembidangan ilmu agama, istilah ulama lebih dipersempit lagi. Misalnya ahli fiqh disebut fuqaha, ahli hadits disebut muhaddisin, ahli kalam disebut mutakallim, ahli tasawuf disebut mutasawwif, ahli tafsir disebut mufassir. Sementara itu orang yang memiliki ilmu kealaman tidak lagi disebut dengan ulama, tetapi disebut ahli dalam bidang masing-masing.

Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama yang semula disebutkan dalam bentuk jamak berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama lebih menjadi sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang fiqh, di Indonesia ulama identik dengan fuqaha, bahkan dalam pengertian awam sehari-hari ulama adalah fuqaha dalam bidang ibadah saja. Betapapun semakin sempit pengertian ulama dari dahulu sampai sekarang, namun ciri khasnya tetap tidak bisa dilepaskan, yakni ilmu pengetahuan yang dimilikinya itu diajarkan dalam jangka khasyyah (adanya rasa takut atau tunduk) kepada Allah swt.

Ada beberapa macam istilah atau sebutan bagi ulama di Indonesia. Di Aceh disebut Teungku, di Sumatera Barat disebut Tuanku atau Buya, di Jawa Barat disebut Ajengan, Jawa tengah dan Jawa Timur Kiyai, Banjar (Kalimantan Selatan) sulawesi dan NTT disebut Tuanku Guru. Ulama bentuk jamak dari alim “terpelajar” (cendikiawan) orang-orang yang diakui sebagai cendikiawan atau sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah para imam masjid-masjid besar (agung) para hakim, guru-guru agama pada Universitas dan secara umumnya merupakan lembaga kelompok terpelajar atau kalangan cendikiawan keIslaman yang memiliki hak penentu atas permasalahan keagamaan. Khususnya dalam sistem monarkis yang turun-temurun. Para penguasa dikukuhkannya melalui keputusan dewan ulama. Untuk menguatkan kekuasaannya dalam memegang tampuk pemerintahan.

Dikotomi antara agama dan politik, dalam hal ini kekuasaan yang berlaku membaginya menjadi 2 golongan yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam tatanan masyarakat, yaitu ulama dan penguasa. Ulama yang dia adalah pintu untuk memahami ilmu agama juga tempat seseorang menanyakan problematika keagamaan dalam kehidupan kesehariannya, dan penguasa adalah pintu untuk mengelola juga mengatur tatanan masyarakat.

Otoritas keagamaan ulama yang dikenal sebagai mujtahid atau penterjemah hukum-hukum agama (syariat), dikembangkan secara luas melalui klaim bahwasanya mereka memiliki hak mengambil keputusan secara independen dan hak menafsirkan permasalahan agama berdasarkan pencapaian intelektual dan spiritual mereka. Otoritas ulama juga dikembangkan secara luas melalui klaim bahwasanya, dalam ketidak hadiran imam atau pimpinan sejati ummat muslim, mereka merupakan orang – orang yang paling saleh dan sekaligus sebagai pemimpin spiritual dan menjadi kewajiban bagi muslim awam menjadikan mereka sebagai pembimbing spiritualitas yang absolute (*marja' i taqlid*).

Ulama juga memperkokoh jalinan mereka dengan masyarakat umum melalui penanganan peradilan, dan santunan, dan harta waqaf, dan dengan memimpin shalat jama'ah dan berbagai upacara perayaan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Jalinan mereka dengan sejumlah besar para artisan, kaum pekerja (buruh), dan elit pedagang sangat besar pengaruhnya.

## B. Ulama dan Politik Kerajaan

Di Nusantara pra-kolonial yang secara tradisional disebut “negeri di bawah angin” di masa itu hubungan antar ulama dan raja (penguasa kala itu) sangat menonjol. Gambaran dari kerajaan Aceh dari Komodor Beaulieu, yang mengunjungi kerajaan tersebut pada 1621 M, sebagaimana dalam kutipannya:

...Qadhi, atau Uskup Agung, dengan otoritas dan pengaruhnya, membujuk mereka (para orang kaya/elite ekonomi) untuk memperhatikan kebijaksanaan yang akan menghilangkan semua kecemburuan mereka, yaitu meletakkan mahkota di atas kepala orang kaya tertentu, orang yang dalam semua pembagian ini tidak menggerakkan atau memengaruhi siapapun bagi diri atau keluarganya, tetapi hidup dalam reputasi sebagai seorang lelaki yang arif, berusia 70 tahun, dan menurunkan salah satu keluarga terhormat di antara orang Aceh (Beaulieu, 1744: I,747)

Di kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara pada abad ke-13 hubungan erat ulama-raja telah terjadi. Ibnu Batutta, penjelajah terbesar Arab yang mengunjungi kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1345/1346 M, melaporkan bahwa Raja kerajaan Samudera Pasai saat itu adalah Sultan Malik al-Zahir sangat gemar belajar Islam kepada para ulama. Dia selanjutnya menyebutkan keberadaan lingkaran pengajaran Islam di istana, di mana ulama dan elite kerajaan terlibat dalam sebuah diskusi tentang Islam.<sup>2</sup> Hal yang sama dapat dikatakan untuk Kerajaan Malaka pada awal abad ke-15. Sejarah Melayu, sumber Melayu untuk kerajaan Malaka, menggambarkan secara detail tentang peran penting ulama dalam kerajaan. Sejarah Melayu menyebutkan ulama memiliki posisi terhormat di dalam istana, sebagai penasihat raja dan pejabat resmi istana.<sup>3</sup>

Peran penting ulama dapat ditelusuri pada pola Islamisasi di Nusantara, yang berlangsung bersamaan dengan berkembangnya ekonomi dan pembentukan kerajaan-kerajaan Islam. Terletak di lokasi strategis sepanjang jalur perdagangan jarak jauh (long distance trade) antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan,<sup>4</sup> beberapa wilayah di Nusantara tumbuh menjadi pusat perdagangan. Umat Muslim internasional, yang menjadi eksponen penting di sepanjang jalur perdagangan, datang dan membangun sejumlah komunitas di wilayah-wilayah pantai. Melalui komunitas ini, Islam diperkenalkan kepada masyarakat lokal. Proses ini menemukan momentumnya pada saat pusat-pusat perdagangan berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Dalam perkembangan tersebut, Islam menjadi bagian hakiki dalam pembentukan kerajaan. Ulama, dengan pengetahuan Islam mereka, memegang berbagai jabatan penting dalam kerajaan Islam. Selain “kelas menengah” ekonomi, orang kaya,<sup>5</sup> ulama menjadi kelas

<sup>2</sup> H A R Gibb, et al, *The Travel of Ibnu Batutta 1325-1354*, (London: The Hakluyt Society, 1994), 876.

<sup>3</sup> R O Winstedt, *The Advent of Muhammadanism in the Malay Peninsula and Archipelago*, (J RAS 77, 1917), 129.

<sup>4</sup> K. N Chahuri, *Trade and Civilization in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 80

<sup>5</sup> J. Well Kathirithamby Wells, *Achehnese Control over West Sumatra up to the Treaty of Painan*, (JSEAS, 1969), 256-257.

“orang kota terhormat”, untuk mengutip Lapidus, yang berkontribusi besar dalam Islamisasi kerajaan dan pada gilirannya penduduk lokal di Nusantara. Mengingat pentingnya konteks kerajaan bagi ulama Nusantara pra-kolonial, maka akan kita ketahui sedikit banyaknya tentang pembentukan kerajaan Islam di Nusantara.

### C. Pembentukan Kerajaan

Berdasarkan sumber-sumber historis yang tersedia tentang sejarah awal Islam di Nusantara, para sejarawan berkesimpulan bahwa kerajaan Samudera Pasai-lah yang dia adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri di Nusantara ini pada akhir abad ke-13. Kesimpulan ini didasarkan pada bukti yang tertera pada nisan Malik al-Saleh, Raja Muslim pertama kerajaan Samudera Pasai, yang berangka tahun 1297.<sup>6</sup> Pendapat ini sesuai dengan cerita yang terdapat dalam Hikayat Raja-Raja Pasai, di mana Malik al-Saleh digambarkan sebagai raja pertama di kerajaan itu yang memeluk agama Islam. Hikayat ini menceritakan bahwa Marah Silu nama asli Malik al-Saleh bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang memintanya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Nabi kemudian memberinya nama Malik al-Saleh. Berdasarkan kejadian tersebut, Marah Sillu memeluk agama Islam dengan julukan ‘Sultan’. Selain itu cerita tersebut mengakui bahwa Malik al-Saleh mendirikan sebuah istana di Samudera, sebuah wilayah di bagian utara Sumatera, sebagai pusat kerajaan.<sup>7</sup>

Ilustrasi tentang Samudera Pasai memperlihatkan suatu proses integrasi Islam, perdagangan, dan politik, yang mejadi karakter penting sejarah awal Islam di Nusantara. Masuk Islamnya Raja Samudera Pasai bertepatan dengan proses pembentukannya menjadi sebuah kerajaan. Malik al-Saleh masuk Islam tidak lama setelah memangku kekuasaan dan mentransformasikan Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam Melayu terkemuka yang mencapai puncaknya pada abad ke-14.

Termasuk dalam pola pembentukan kerajaan seperti ini adalah Kerajaan Malaka. Catatan perjalanan Tome Pires menunjukkan bahwa Malaka muncul sebagai sebuah kerajaan penting pada abad ke-14, bersamaan dengan makin meningkatnya keterlibatan kerajaan itu dalam perdagangan internasional, dan pada gilirannya melampaui peran penting kerajaan pendahulunya yaitu kerajaan Islam yang berdiri pertama kali, kerajaan Samudera Pasai.<sup>8</sup>

Proses yang sama juga terjadi dalam pembentukan Kerajaan Aceh pada abad ke-16. Penaklukan Portugis atas Malaka pada 1511, yang menyebabkan makin tersebarnya jaringan perdagangan Asia, memberi kesempatan Aceh menjadi pusat utama perdagangan. Hancurnya jalur perdagangan Mlaka juga membuat wilayah-wilayah pesisir Jawa semakin terlibat aktifitas perdagangan jarak jauh abad ke-16. Para pedagang Muslim, yang menjadi elite sosial terkemuka, berkontribusi dalam proses transformasi pusat perdagangan di wilayah-wilayah itu menjadi kerajaan Islam. Demak adalah kerajaan Jawa pertama yang muncul pada akhir abad ke-16, menandai permulaan periode Islam dalam sejarah Jawa. Raden Fatah, kemungkinan besar pedagang Muslim

---

<sup>6</sup> Penting ditekankan di sini bahwa tahun yang diduga kuat sebagai masa terjadinya konversi Samudera Pasai, 1297, didasarkan pada perbandingan laporan-laporan Marcopolo pada tahun 1292 yang mana ia mencatat bahwa pada saat itu Samudera Pasai belum berkonversi ke Islam. Para sejarawan kemudian menyimpulkan Islamisasi berlangsung antara tahun 1292-1297. Untuk pembahasan kritis mengenai teori Islamisasi ini silahkan lihat A.H Hill, *Hikayat Raja-Raja Pasai*, (JMBRAS, 1960), 6-21.

<sup>7</sup> A.H Hill, *Hikayat Raja-Raja Pasai*, (JMBRAS, 1960), 55-57.

<sup>8</sup> Tome Pires, *The Suma Oriental fo Tome Pires, translated by Armando Cortesao London: (The Hakluyt Society, 1994), 241-242.*

Cina, mejadi Raja pertamanya. Demak berkembang pesat selama kekuasaan Raja ketiganya, Trenggana (berkuasa 1505-1518 M dan 1524-1546 M).<sup>9</sup> Pada 1527 M, menandai berdirinya kekuatan politik Islam di Jawa dan menggantikan kerajaan Hindu-Buddha.

Dengan demikian, Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan kerajaan, dan pada gilirannya pembangunan sistem politik dan budaya. Dan ulama, menjadi kelompok sosial utama yang terlibat dalam kehidupan istana kerajaan. Menyandang posisi sebagai penasihat raja, ulama juga berperan memperkuat pelaksanaan ajaran Islam di kerajaan. Namun, perlu ditekankan bahwa peran sentral ulama harus juga dipandang dalam kaitan dengan budaya dan politik yang telah berlangsung lama di Nusantara. Yang memandang raja sebagai pusat aspek segala kehidupan. Raja tidak hanya dianggap sebagai pemilik tunggal wilayah kerajaan dan warganya, tetapi juga diyakini seperti Buddha yang mencerahkan makhluk, bodhisatwa, yang “meninggalkannirwana untuk menetap di bumi dan membantu pembebasan spiritual para pengikutnya”.<sup>10</sup>

Terutama dalam hubungannya dengan dunia Melayu, raja dianggap sebagai perwujudan kerajaan, dan rakyat menggambarkan diri mereka sebagai hidup di bawah kekuasaan sang raja. Dalam bingkai budaya politik kerajaan inilah, bentuk awal penerjemahan Islam di Nusantara berlangsung. Salah satu isu pokok dalam pembentukan kerajaan adalah perumusan ideologi politik yang berhubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk Islam di wilayah tersebut. Hasilnya pandangan politik berpusat pada raja (raja-centred political notion) menjadi basis kultural bagi pembentukan diskursus intelektual Islam sepanjang periode tersebut.

#### **D. Qadhi Dan Syaikhul Islam**

Beralih ke kutipan di awal makalah ini, peran penting ulama di Nusantara masa pra-kolonial dibangun melalui institusi hukum, kadi. Lembaga/jabatan kadi membentuk salah satu kedudukan penting ulama dalam sistem peradilan, yang memberi mereka peluang memiliki otoritas keagamaan. Melalui lembaga kadi, hukum Islam (syariat) dirumuskan dan fatwa dikeluarkan. Dengan demikian, ulama memegang peran sentral dalam meregulasi dan menentukan kehidupan keagamaan umat Islam. Posisi kadi sering dianggap sebagai sebuah indikator pengaruh Islam dalam masyarakat muslim.<sup>11</sup>

Keberadaan kadi dapat ditelusuri ke periode ketika Islam muncul sebagai sebuah fenomena sosial dan politik. Kerajaan Malaka pada abad ke-15 tampak telah memiliki sebuah jabatan kadi. Sejarah Melayu menyebut kepala pengadilan atau kadi beberapa kali, menunjukkan nilai penting agama di dalam peradilan. Sultan Mahmud Syah, Raja Malaka, digambarkan dalam Sejarah Melayu, belajar dari kadi Munawar Syah tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial. Sejarah Melayu juga menyebut Kadi Yusuf-ayah dari kadi Munawar Syah- sebagai salah seorang yang “memengaruhi perpindahan keyakinan penduduk Malaka ke agama Islam”. Kadi Kerajaan Malaka juga disebutkan dalam catatan Tome Pires, di mana dilaporkan bahwa

<sup>9</sup> Th.G.Th. Pigeaud, *Literature of Java: (The Hague: Martinus Nijhoff)*, 58-67.

<sup>10</sup> A.C Milner, *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule*, Tucson, (Arizona University Press: 1982), 31-32.

<sup>11</sup> Dalam studinya tentang kerajaan-kerajaan Melayu, Gullick menghubungkan pengaruh Islam dengan kantor Qadi, dalam arti bahwa karena “di sana tidak ada kadi” hingga masa protkesi Inggris” dia menyimpulkan bahwa Islam “sampai taraf tertentu bukanlah ‘agama kerajaan’” dan “doktrin hukum Islam” tak pernah menjadi “hukum yang berlaku” lihat juga Milner, 23.

kadi telah mendorong raja untuk berjuang melawan Portugis. Dia menulis, “para kashis (kadi) dan mullah (ulama) mereka berkata kepadanya (Raja Malaka) bahwa dia seharusnya tidak berdamai; karena sebagaimana India telah jatuh ke tangan Portugis, Malaka seharusnya tidak meyerah ke kaum kafir”

#### **E. Hubungan Ulama Dan Penguasa Masa Kolonialisme**

Pada abad ke-18, walaupun kompeni Belanda telah menguasai hampir seluruh kepulauan Nusantara, namun Belanda pun mengalami kemunduran dalam bidang perdagangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya pegawai yang korupsi dan turunnya harga rempah-rempah yang akhirnya membuat VOC dibubarkan pada tahun 1796.<sup>12</sup>

Banten kemudian dikuasai oleh Gubernur Jendral H.W. Daendels yang saat itu diberikan tugas untuk mengamankan dan mempertahankan pulau Jawa dari serangan tentara Inggris yang berpangkalan di India. H.W. Daendels membuat sarana pertahanan, diantaranya membuat Poswage (jalan pos) personil, barak militer, Benteng, rumah sakit. Hal ini harus segera diselesaikan dengan dana serendah mungkin. Untuk itulah kompeni Belanda membuat peraturan kerja rodi atau kerja paksa. Namun permintaan ini ditolak oleh sultan Aliyuddin karena dianggap membuat penderitaan pada rakyat.<sup>13</sup> Hal ini memicu konflik dan penghapusan kesultanan Banten oleh H.W. Daendels pada tahun 1808 M.

Di bawah kekuasaan H.W. Daendels, pemerintahan kolonial mulai merubah cara eksploitasi dari cara lama yang konservatif yang memusatkan pada perdagangan melalui VOC menjadi eksploitasi yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Selain itu penghapusan tanah kesultanan, penghapusan gelar keturunan sultan dan kebijakan sistem kerja wajib, telah menimbulkan reaksi dikalangan rakyat dan mengakibatkan timbulnya beberapa gerakan sosial yang dipimpin oleh kaum ulama, jawara dan tuan tanah kepada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kekacauan yang sering terjadi di wilayah Banten pada abad ke-19, mulai dari perampokan terhadap kapal-kapal Belanda, kekacauan di markas kolonial Belanda dan bahkan mampu memukul mundur pasukan H.W. Daendels. Oleh karena itu untuk melemahkan perlawanan rakyat, Daendels membagi daerah Banten menjadi tiga daerah yang statusnya sama dengan kabupaten: Banten Hulu, Caringin dan Anyar. Ketiga daerah tersebut di bawah pengawasan landros (semacam residen) yang berkedudukan di Serang.<sup>14</sup> H.W. Daendels, kemudian mengangkat Sultan Muhammad Syafiuddin (1809-1811 M) untuk meredakan perlawanan dan ketegangan di kalangan rakyat Banten.

Pada tahun 1810 M terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Nuriman di Pandeglang, tepatnya di Pasir Peuteuy. Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan kolonial Belanda atas penghampusan Kesultanan Banten. Di tengah kerusuhan politik, anarki dan ambruknya sistem administrasi dan silih bergantinya gelombang kekerasan, pemerintah kolonial Belanda pun menobatkan Sultan Banten untuk meredam pemberontakan. Namun, upaya itu pun gagal, karena pemerintah Sultan tidak lagi berpihak kepada masyarakat pribumi, dan pada dasarnya

---

<sup>12</sup> Hendrik E. Niemeijer, *Pengurus Pusat VOC dan Lembaga-lembaga Pemerintahan Kota Batavia (1619-1811)* sebuah pengantar, terj. Dr. Th. van den End, 88.

<sup>13</sup> Permintaan Daendels yang diwakilkan oleh Komondeur Philip Peter du Puy untuk meminta persetujuan kepada sultan, namun karena kebencian yang sudah memuncak kepada Belanda. Akhirnya Mangkubumi Wargadireja memenggal kepala Du Puy dan membunuh semua pengikutnya, situasi ini yang akhirnya membuat H.W Daendels melakukan penyerangan dan penghapusan Kesultanan Banten.

<sup>14</sup> Halwany Michrob, *Catatan Masa Lalu Banten...*, 184.

Sultan Banten lemah dan korup. Hal ini yang membuat keadaan Banten terus mengalami kekacauan dan tidak aman.

Selama masa pemerintahan Sultan, golongan-golongan elit yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda masih tetap aktif, terutama para pemilik tanah, ulama, jawara dan petani. Sebagian ada yang melakukan penyamunan, dan yang lain terus membangkang terhadap kebijakan pemerintah Belanda, terutama dalam kebijakan perpajakan tanah yang tinggi dan sistem Tanam Paksa (*cultuurstelsel*), telah membuat masyarakat Banten sempat mengalami kemiskinan dan kelaparan.<sup>15</sup>

Sejumlah serangan masih dilakukan oleh rakyat Banten, pada tahun 1811, gerakan sosial untuk menguasai wilayah kesultanan Banten dipimpin oleh Mas Jakaria yang merupakan seorang ulama dan pemilik tanah yang memiliki ilmu hikmah (*magi*). Sebagai orang yang dihormati di desanya, berhasil mengumpulkan banyak pengikut, sebelum akhirnya melakukan penyerangan. Perlawanan Mas Jakaria sempat membuat pemerintah kolonial Inggris dan para elit birokrasi menjadi panik. Serangan Griilya yang dilakukan oleh Mas Jakaria sempat membuatnya menduduki daerah Pandeglang. Ketika Inggris berhasil dikalahkan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1816, pergerakan Mas Jakaria masih melakukan penyerangan kepada elit birokrasi kolonial Belanda. Sebelum Akhirnya pada tahun 1827, Pamong Praja dari kolonial Belanda berhasil menangkap Mas Jakaria dan dijatuhi hukuman mati. Kepalanya di panggal dan mayatnya dibakar.<sup>16</sup>

Setelah perlawanan Mas Jakaria berakhir, hampir setiap tahun muncul kerusuhan atau perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Banten untuk mengembalikan kejayaan dan memproklamasikan kembali kerajaan kuno atau keultanan Banten yang telah dihapuskan dan membebaskan diri dari penjajahan kolonial Belanda. Setidaknya ada peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1818 dan awal tahun 1819, Haji Tassin, Moba, Mas Haji dan Mas Rekka, melakukan pemberontakan di Banten Selatan, dengan mengadakan kerusuhan dan berhasil membunuh pejabat pamongpraja Lebak.<sup>17</sup> Perlawanan juga terjadi pada tahun 1820, 1822, 1825, dan 1827, yang di pimpin oleh Mas Reye, Tumenggung Muhammad dari Menes dan Mas Aria dan di Bantu oleh para ulama. Anak-anak Mas Jakaria pun melanjutkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1845 di bawah pimpinan Mas Anom, Mas Serdang, dan Mas Andong dalam peristiwa Cikande Udik.<sup>18</sup>

Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Banten untuk melawan pemerintahan Belanda di pimpin oleh ulama yang mampu memobilisasi rakyat dari semua golongan mulai dari, petani, buruh, dan jawara. Ulama dalam persepsi masyarakat Banten, dipandang sebagai mata rantai utama antara “tradisi kecil” sistem sosial desa dengan “tradisi besar” atau lingkungan di atas tingkat desa. Lebih dari itu, kiai karena kepandaiannya dalam bidang agama, juga sebagai orang yang memiliki otoritas “tafsir” bagi kepentingan praktek kemasyarakatan. Melalui otoritasnya ini, ulama dapat membentuk struktur masyarakat yang efektif dengan orientasi dan visi keberagamaan yang dikonstruksi oleh ulama. Dalam konteks itu, posisi ulama sangat sarat dengan

<sup>15</sup> Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa; Studi historis 1850-1942*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), 2.

<sup>16</sup> Arsip Banten no.181 Laporan Residen Banten tahun 1827. Baca juga Hendrik F. Isnaeni dalam majalah *Historia*, terbitan 1 September 2008.

<sup>17</sup> Halwany Michrob, *Catatan Masa...*, 197.

<sup>18</sup> Nina H. Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah; Sultan, Ulama, Jawara*, (Jakarta: LP23ES, 2003), 102.

kemungkinan-kemungkinan untuk menjamin dan memperbesar pengaruhnya.<sup>19</sup> Hal ini yang membuat para ulama mampu menggerakkan seluruh rakyat untuk melawan kebijakan Belanda yang telah membuat penderitaan dalam kehidupannya.

## F. Kesimpulan

Harapan masyarakat Muslim kepada para ulama cukup tinggi, karena saat ini kepada para ulama-lah diharapkan dapat memberikan pencerahan yang menyejukkan, sebagai contoh dan suri tauladan, sebagai tempat bertanya dan sekaligus dapat memberikan solusi dari persoalan yang dihadapi.

Kaitan ulama dengan penguasa tidak dapat dipisahkan karena kaedunya adalah dua aspek penting dalam melangsungkan tatanan masyarakat yang baik. Seorang ulama boleh saja terjun kepada politik praktis dan menjadi penguasa (pemimpin) namun bila menjadi pemimpin harus berlaku adil, jujur, bersahaja, tidak memamerkan kemewahan duniawi dan tidak korupsi.

Kepemimpinan yang baik itu dari penguasa yang mengatur tatanan negara dan aspek lainnya, juga ulama yang menyejukkan akan menciptakan hubungan harmonis antar sesama makhluk. Sebaliknya resiko yang akan jika tidak berlaku adil, tidak jujur, tidak bersahaja, jauh dari masyarakat, memamerkan kehidupan dunia dan korupsi akibatnya bukan hanya kepada “seorang ulama yang buruk” itu saja bahkan kepada umat Islam seluruhnya turut menanggung malunya.

Maka, sangat jelas bahwa Islam memang telah dirumuskan dalam kerangka pemikiran politik yang memberi penekanan pada kepemimpinan penguasa yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azumardi. Jaringan Ulama; Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. Jakarta: PrenadaMedia, 2018.
- H A R Gibb, et al, The Travel of Ibnu Batutta 1325-1354. London: The Hakluyt Society, 1994.
- Carey, Peter B.R. A Further Note on Profesor Johns’ “giftAddressed to The Spirit of The Prophet”, BKI
- Djajadiningrat, Hoesein. Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten. Jakarta: Djembatan, 1983.
- Guillot, Claude. Banten; Sejarah dan Peradaban abad X-XVII.
- Halwany Michrob dan Chudari A. Mudjahid, Catatan Masa Lalu Banten. Serang: Sausara, 1993.
- Hamka, Dari Perbendaharaan Lama: Menyingkap Sejarah Islam di Nusantara. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Jajat Burhanudin, Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
- Jajat Burhanudin, Ulama dan Kekuasaan, Jakarta: Mizan 2012.
- Kartodirjo, Sartono. Pemberontakan Petani Banten. Depok: Komunitas Bambu, 2015.
- Lubis, Nina H. Banten dalam Pergumulan Sejarah; Sultan, Ulama, Jawa. Jakarta: LP23ES, 2003.
- Pires, Tome. The Suma Oriental of Tome Pires and of Francisco Rodrigus, terj. Adrian Perkasa. Yogyakarta: Ombak, 2015.

---

<sup>19</sup> H.S. Suhaedi, *Jawara Banten: Perspektif Transformasi Masyarakat Banten*, (Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2005), 5.



- Pudjiastuti, Titik Perang, Dagang, Persahabatan. Yogyakarta: Yayasan Obor, 2007.
- R O Winstedt, The Advent of Muhammadanism in the Malay Peninsula and Archipelago, J RAS 77, 1917.
- K. N Chahuri, Trade and Civilization in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750, Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Suhaedi, H.S. Jawa Banten: perspektif Transformasi Masyarakat Banten. Serang: LP2M IAIN SMH Banten.
- Suhartono, Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa; Studi historis 1850-1942. Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Untoro, Heryanti Ongkodharma. Kapitalisme Pribumi Awal Kesultanan Banten 1522-1684; Kajian Arkeologi-Ekonomi (Depok: Komunitas Bambu, 2007.

### **Arsip & Manuskrip**

- Arsip Banten no.181 Laporan Residen Banten tahun 1827.
- Arsip F.S Gaastra Organisasi VOC yang diterjemahkan oleh Syahritha Chairaty dan Dr.Th. van den End, 28.
- Jav.hs. uit de collectie van Prof. Snouck Hurgronje, Sadjarah Hadji Mangsoer. Leiden: R. Univ Bibliotheek, 193.
- Manuskrip Babad Banten Pupuh XXII, dialihaksarakan oleh keturunan sultan Banten. Niemeijer, Hendrik E. Pengurus Pusat VOC dan Lembaga-lembaga Pemerintahan Kota Batavia (1619-1811) sebuah pengantar, terj. Dr. Th. van den End.

### **Artikel & Jurnal**

- Siregar, P. Perjuangan Rakyat Banten melawan Belanda; Sudi Ki Wasid, Buletin Al-Turas UIN Syarif Hidayatullah Vol. XXIII no. 1, Januari 2017.
- Sastro Wijoyo, Radjimo. Di Bawah Bayang-Bayang Ibu kota: Penataan Daerah di Provinsi Banten dari Masa Kolonial sampai Zaman Reformasi. Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol.2, No. 2, 2017.